Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2023) 117–126 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.58

Pilihan Politik Masyarakat Melayu Pesisir Pantai di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2019

Muhammad Rahma Doni
Universitas Sumatera Utara
rahmadonimhd@gmail.com

ABSTRACT

Political choices are preferences, actions, and individual information processing to make political decisions. Although it is often assumed that political institutions play a major role in public policy making, individuals also have the ability to influence political institutions. Community participation in politics is when an individual or a group of people actively engage in political life, including in the election of national leaders, and directly or indirectly influence government policies, public policy. This research uses a qualitative method (Field Research) that is descriptive by using primary data sources, conducting interviews with the coastal Malay community of Tanjung Tiram, community leaders, Malay Youth, Head of the Batu Bara KPU, and Religious Leaders, regarding the political choices of the Tanjung Tiram coastal community in Batu Bara Regency, the political insights of the coastal Malay community, and the cultural impact of Malay culture on the political choices of the community.
Keywords: *politics, choice, Malay, Tanjung Tiram*

ABSTRAK

Pilihan politik merupakan preferensi, tindakan, dan pemrosesan informasi individu untuk membuat keputusan politik. Meskipun sering dianggap bahwa lembaga politik memiliki peran utama dalam pembuatan kebijakan publik, nyatanya individu dalam kapasitas masing-masing juga memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap lembaga politik. Partisipasi masyarakat dalam politik adalah ketika seseorang atau sekelompok orang secara aktif terlibat dalam kehidupan politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Penelitian Lapangan) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan masyarakat Melayu Pesisir Tanjung Tiram, tokoh masyarakat, Pemuda Melayu, Ketua KPU Batu Bara, dan Tokoh Agama, mengenai pilihan politik masyarakat Pesisir Tanjung Tiram di Kabupaten Batu Bara, wawasan politik masyarakat Melayu Pesisir, serta dampak budaya Melayu terhadap pilihan politik masyarakat.
Kata Kunci: politik, pilihan, Melayu, Tanjung Tiram

PENDAHULUAN

Politik pada dasarnya adalah suatu hal yang memiliki banyak kesamaan dengan manusia, yang pada dasarnya selalu hidup bermasyatakat. Politik adalah proses pembentukan masyarakat untuk membuat keputusan khususnya dalam negara. Maka politik tidak terlepas dari semua kebijakan publik yang diputuskan oleh pelaksana dalam pemerintahan.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2023) 117–126 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.58

Secara konseptual, pilihan politik merupakan preferensi, *action*, dan pemrosesan informasi seorang individu untuk mengambil keputusan politik. Meskipun masyarakat seringkali bahwa lembaga politik memainkan peran utama dalam membuat kebijakan publik, nyatanya individu dalam kapasitas masing-masing juga mampu memberikan pengaruh terhadap lembaga politik. Kacamata kajian pendekatan perilaku menekankan bahwa pilihan politik berbasis pada individu politik. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Kajian ini berfokus pada pilihan politik masyarakat Melayu Pesisir di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Dalam konteks penelitian ini, budaya Melayu adalah bagaimana masyarakat melayu pesisir pantai sebagai sebuah bagian yang penting karena melihat dan memandang kehidupan masyarakat Kabupaten Batu Bara berasal dari budaya Melayu. Perilaku, sikap, dan prinsip masyarakat Melayu pesisir di Tanjung Tiram juga akan berpengaruh dalam penelitian ini.

Mayoritas suku Melayu di Tanjung Tiram memiliki sumber daya manusia yang kuat dan organisasi masyarakat Melayu berbasis Islam. Ketika penulis melihat ini dengan mempertimbangkan keadaan sosial politik yang berlaku, penulis merasa ini sangat menarik. Mayoritas masyarakat pesisir di Tanjung Tiram adalah suku asli Melayu yang menganut agama Islam. Realitas yang menarik adalah bahwa kepribadian Islami kelompok masyarakat Melayu pesisir di Tanjung Tiram tidak memastikan bahwa mereka mendukung partai dengan karakter Islami. Sedemikian rupa sehingga terjadi pada Pemilu 17 April 2019 dari data KPU Batu Bara bahwa dapil 2 yaitu Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi mendapat 11 kursi dari 35 kursi seluruh Batu Bara. Namun Partai Keadilan Sejahtera yang berlandaskan Islam dan mempunyai visi Menjadi "Partai Islam Rahmatan Lil'alamin Yang Kokoh Dan Terdepan Dalam Melayani Rakyat Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia" Tidak dapat meraih 1 kursi di dapil 2 yaitu Tanjung Tiram dan Talawi.

Hal ini juga terjadi sepanjang keberadaan suku yang terbanyak di Indonesia. Kekuatan partai berbasis Islam seperti PKS, PPP, dan PBB serta partai berbasis massa seperti PKB bukanlah kekuatan yang lebih besar, padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pertentangan tersebut tergantung pada konsekuensi dari 5 pemilihan mayoritas yang telah diadakan, yaitu hasil keputusan politik tahun 1995 dimenangkan oleh PNI dengan jumlah suara 8.432.653, keputusan politik tahun 1999 dimenangkan oleh PDI dengan jumlah suara 35.706.618 suara, keputusan politik 2004 dimenangkan oleh Golkar dengan 24.480 suara. Dengan 21.703.137 suara, Partai Demokrat menang dalam pemilu 2009. PDIP memenangkan pemilu 2014 dengan 23.681.471 suara, Keputusan politik 2019 dimenangkan oleh PDIP dengan 27.053.961 suara.

Masyarakat Melayu pesisir pantai di Tanjung Tiram merupakan salah satu kecamatan di Batu Bara yang masih kuat mempertahankan kemurnian suku Melayu,

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2023) 117–126 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.58

walaupun masyarakat suku lain telah masuk di Tanjung Tiram seperti suku Aceh, Batak, Jawa, Padang dan India namun tidak membuat suku Melayu kehilangan nilai-nilai yang diwariskan nenek moyang kepada generasi berikutnya. Akibatnya, kelompok masyarakat tersebut sudah mengikuti norma-norma budaya tertentu.

Masyarakat Melayu di Tanjung Tiram selalu aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, seperti mengikuti proses pemilihan, mengikuti musyawarah daerah, gotong royong, dan kegiatan lainnya. Namun dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap politik masyarakat melayu di Tanjung Tiram sangat muda di tunggangi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehinggah banyak terjadi politik uang atau biasa disebut money politic. Bisa dilihat dari Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia untuk Kabupaten Batu Bara yang di ketuai oleh pejabat daerah yg bukan bersuku melayu. Beliau di lantik pada tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Strategi eksplorasi dapat diartikan sebagai metode logis untuk mendapatkan informasi dengan alasan yang jelas,mendemonstrasikan, membuat, dan melacak informasi, hipotesis, untuk memahami, mengatasi, mengatasi, dan memiliki pilihan untuk mengantisipasi masalah yang ada di kehidupan manusia. Guna dari metode penelitian ini adalah tidak lain untuk menemukan dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk dapat memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif para partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan beberapa sudut pandang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan tahapan-tahapan menurut kaidah atau langkah-langkah yang diperlukan untuk pengumpulan data dan berlangsung dalam kondisi alamiah pada suatu peristiwa atau peristiwa.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini diadakan. Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara tepatnya di Desa Bandar Rahmat.

Metode pengumpulan informasi merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikumpulkan dalam setting alamiah (kondisi alam), dengan menggunakan sumber data primer atau sekunder, atau dengan berbagai cara lain, menurut Sugiyono (2017, hlm. 101). Selain itu observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data.

Analisis data melibatkan penempatan dan penggabungan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dibagikan dengan orang lain. Dengan mengatur informasi, menggambarkannya sejauh unit diskrit, memadukannya, mengumpulkannya menjadi desain, memilih klasifikasi mana yang penting dan mana yang akan diselidiki, dan membuat kesimpulan yang jelas untuk satu dan lainnya. Pemikiran logis, yang digunakan dalam pemeriksaan informasi, mencakup penutupan dengan berpikir dari

Vol 24 No 3 (2023) 117–126 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.58

proklamasi umum atau hipotesis ke penjelasan eksplisit. Penulis menyimpulkan informasi spesifik dari pernyataan umum menggunakan metode ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang sering kali timbul adalah pertanyaan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak. Sebagai titik terang setiap ilmu pengetahuan berusaha mambatasi diri pada aspek-aspek yang spesifik terutama mengenai obyek yang menjadi ruang lingkup penelitiannya.

Para sarjana ilmu politik pada pertemuan di Paris tahun 1948 berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah "keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu". Definisi lain yang juga serupa adalah "ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan penegtahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis".

Secara garis besar dalam perkembangan ilmu politik dapat dibagi menjadi dua yaitu Politik: Sebagai suatu kemahiran dan sebagai Ilmu

Sebagai kemahiran berarti adalah: Kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam berpolitik. Sedangkan sebagai Ilmu: Suatu studi yang memelajari negara/pemerintah dan gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat sebagai objeknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik merupakan ilmu yang memelajari gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat, dan tergolong dalam ilmu sosial.

Pengertian Ilmu Politik

Secara Etimologis istilah "politik" berasal dari kata dalam bahasa Yunani Kuno ykani "polis" yang artinya adalah negara kota. Menurut Carl Schmitt Politik adalah alat untuk membedakan antara kawan dan lawan. Menurutnya hubungan kawan dan lawan inilah yang menjadi essensi politik. Isjwara mendefinisikan ilmu politik kedalam tiga golongan, yaitu:

a) Pendefinisian secara institusional (memelajari lembaga-lembaga politik)
b) Pendefinisian secara fungsional (di samping memelajari lembaga-lembaga politik juga dipelajari fungsi-fungsi lembaga politik tersebut)
c) Pendefinisian secara hakekat politik, yakni kekuasaan (power) sebagai objeknya

Secara umum Wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Selain itu, wawasan menujukkan kegiatan untuk mengetahui isi serta pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat, atau tanggap indrawati sedang Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan di gunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Wawasan politik adalah pengetahuan sesorang atau masyarakat tentang politik atau peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

> *"Arti wawasan politik bagi masyarakat pesisir pantai berbeda-beda, meski mereka memiliki budaya dan suku yang sama. Ada yang memandang politik adalah alat*

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2023) 117–126 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.58

untuk mencapai tujuan kekuasaan ada juga yang memandang politik untuk meluaskan kebermanfaatkan melalui kekuasaan, ada juga yang memandang politik sebagai transaksi untuk menghasilkan suara. Bagi sebagian org politik adalah hal untuk meningkatkan kekayaan pribadi, namu bagi kaum intekektual dan cendikiawan menganggap politik adalah alat untuk mencerdasakan kehidupan bangsa. Tidak hanya wawasan politik yang kurang namun partisipasi juga cendrung tidak terlalu tinggi, terlihat dari pilihan masyarakat yang tidak berdasarkan program kerja tapi berdasarkan berapa banyak hadiah yang diberikan oleh calon pemimpin." Ungkap seorang politikus, bapak Fahri Ramzi.

Berdasarkan ungkapan beliau serta fakta di lapangan, bahwa wawasan masyarakat sangat minin, kurangnya edukasi dari masyarakat itu sendiri maupun tidak adanya sosialisasi dari pemerintah tentang politik yang baik. Kurangnya pengawasaan dari KPU dan BAWASLU terhadap partai-partai atau bakal calon. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah, public policy.

Penentuan pemilihan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya baik itu identifikasi partai, isu maupun kandidat parpolyang merupakan akibat dari proses sosialisasi politik (Efriza, 2012). Identifikasi seseorang terhadappartai tertentu yang kemudian akan memengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Dennis Kavanagh (Mukti, 1997) melalui bukunya yang berjudul *Political Science and Political Behavior* menyebutkan bahwa pendekatan psikologis merupakan suatu hal yang fenomenal dan menjadi perilaku memilih masyarakat dalam Pemilukada, khususnya di kalangan pemilih pemula yang menjadi dasar dalam menentukan sikap politiknya.

Sikap demokratis dalam sistem politik akan lebih efektif jika masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk melakukan perubahan dibandingkan mengambil sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau sering juga disebut golput (golongan putih). Kenyataannya masih banyak masyarakat yang bersikap tidak peduli dengan politik. Mereka kebanyakan lebih memilih untuk apatis terhadap kegiatan pemilu karena mereka kurang simpatik terhadap hal- hal yang terjadi di dunia politik.

Menurut Akhrani (2016), faktor-faktor yang memengaruhi pemilih untuk memilih adalah kesadaran politik, kepercayaan politik, orientasi nilai sosial, dan sikap politik. Salah satu yang menggerakkan pemilih untuk memilih adalah mengenai kesadaran politik. MenurutRamlan (2010), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiardjo, 2008). Sedangkan menurut Surbakti (2007) kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang tentang lingkungan masyarakat

Vol 24 No 3 (2023) 117–126 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.58

dan politik menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Sementara Milbiath (2001) menambahkan bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik seperti Pilpres.

Berbeda adalah soal pilihan. Salah satu pilihan yang kerap menunjukkan kita berbeda adalah pilihan politik. Keberbedaan pilihan politik itu adalah sah dan tidak dilarang. Keabsahan berbeda dalam pilihan politik juga terkandung arti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia untuk tidak selalu harus sama dalam memilih. Kesalahan dalam mengartikan keberbedaan pilihan politik menjadi penyebab ketidaksukaan dan kebencian terhadap pemilih berbeda. Berbeda tidaklah lagi kebhinnekaan, tetapi berbeda adalah ketidaksamaan, sehingga menyikapinya adalah dengan penghadangan terhadap pihak-pihak yang tidak sama dengannya. Pandangan itulah yang dapat dirasakan pada pemilu Tahun 2019 di kecamatan tanjung tiram kabupaten batu bara. Hingga setiap pemilihan wakil rakyat masyarakat selalu berbeda pandangan dan pilihan yang selalu didasari oleh pemberian hadiah dari calon wakil rakyat. Sebuah episode yang telah mencederai pesta demokrasi yang terjadi 5 tahun sekali.

Untuk itu, maka kedewasaan sikap mendesak dilakukan. Kedewasaan dengan mengintospeksi diri pribadi masing-masing pemilih bahwa pilihan politik lebih dari satu menjadikan pilihannya kepada dua atau lebih pilihan berbeda realitas harus diterima. Dengan kesadaran ini juga, maka keberbedaan adalah bagian dinamika biasa dan tidak harus disikapi dengan tindakan kontraproduktif, tetapi lebih baik menggunakan cara rasionalitas kedewasaan menghadapi keberbedaan tersebut. Melalui kedewasaan sikap demokrasi akan berakar dan berjalan serta bertahan lama, meskipun tidak sama pilihan politiknya. Demokrasi, idealnya, dibangun dengan fondasi partisipasi, kesukarelaan kebebasan memilih dan bukan dengan mobilisasi, keterpaksaan dan ancaman

Secara umum, pilihan politik di masyarakat melayu pesisir pantai tanjung tiram kabupaten batu bara terpecah belah atau tidak satu pilihan, mereka terbagi-bagi dalam beberapa pilihan berdasarkan kepercayaan mereka terhadap partai politik yang ada di masyarakat. Hal ini juga terlihat pada saat pemilu 2019, dimana masyarakat yang masyoritas melayu dan islam namun partai politik yang berlandaskan islam tidak memiliki kursi di wilayah yang mayoritas islam. Tak hanya masalah agama, mayaritas masyarakat yang memiliki suku melayu pun tidak memilih calon wakil rakyat dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri, dikarenakan pilihan msyarakat tidak lagi berdasarkan agama, suku ataupun berdasarkan kebijakab program yang ditawarkan oleh calon wakil rakyat nanum juga adanya praktik money laundry. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Dalam cakupan yang sangat luas, politik uang akan memicu korupsi sebelum pemilihan (untuk mengembalikan modal politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir para penyumbang/donator).

Kekuatan partai berbasis Islam seperti PKS, PPP, dan PBB serta partai berbasis massa seperti PKB dan Wajar bukanlah kekuatan yang lebih besar, padahal

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2023) 117–126 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.58

mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pertentangan tersebut tergantung pada konsekuensi dari 5 pemilihan mayoritas yang telah diadakan, yaitu hasil keputusan politik tahun 1995 dimenangkan oleh PNI dengan jumlah suara 8.432.653, keputusan politik tahun 1999 dimenangkan oleh PDI dengan jumlah suara 35.706.618 suara, keputusan politik 2004 dimenangkan oleh Golkar dengan 24.480 suara. Dengan 21.703.137 suara, Partai Demokrat menang dalam pemilu 2009. PDIP memenangkan pemilu 2014 dengan 23.681.471 suara, Keputusan politik 2019 dimenangkan oleh PDIP dengan 27.053.961 suara.

Budaya Politik di Indonesia bisa dilihat dari pelaku masyarakatnya. Jadi, pengertiannya yaitu tindakan atau sikap warga negara dalam merespon struktur serta aktivitas politis dalam sebuah wilayah. Adapun mengenai budaya poliktik ini berasal dari aspek tertentu, seperti adat, pengetahuan serta norma masyarakat. Hasil pemahaman, pembelajaran maupun analisis dalam kurun waktu tertentu oleh masyarakat yang akhirnya membentuk budaya. Sifat budaya yang berkembang di masyarakat indonesia sekarang adalah mixed political culture. Selain mempunyai budaya bertipe parokial, juga memegang partisipan.

Menurut para ahli, budaya politik masyarakat Indonesia tidak hanya menganut satu tipe saja. Parokial bisa dilihat dari kurangnya partisipasi warga negara terhadap kegiatan bidang ini. Kurangnya partisipasi ini bisa karena banyak hal. Secara umum, kasus tersebut bisa ditemui pada wilayah masyarakat yang sulit dijangkau, seperti pedalaman gunung, pesisir maupun desa terpencil. Selain itu bisa juga karena faktor lain, seperti ekonomi, rendahnya pendidikan maupun sarana prasarana. Sedangkan budaya politik di Indonesia partisipan bisa dilihat dari aktifnya peran masyarakat yang membuka suara setiap ada aktivitas politik. Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak rakyat. Berdasarkan buku yang berjudul Mengenal Ilmu Politik (2015) karya Ikhsan Darmawan, terdapat tiga tipe budaya bidang ini. Budaya politik di Indonesia masuk ke dalam tipe yang sudah disebutkan sebelumnya. Tiga tipe tersebut antara lain:

1. Parokial

   Parokial mempunyai cakupan daerah terbatas. Jadi, lingkupnya kecil dalam zona daerah. Parokial menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam kegiatan bidang ini rendah.

   Biasanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tradisional atau berada di wilayah terpencil, sehingga sarana untuk ikut berpartisipasi pun kurang memadai. Parokial ditandai dengan kurang tertariknya warga mengenai masalah politik.
2. Partisipan

   Budaya politik di Indonesia partisipan ditandai dengan kesadaran rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan aspek ini. Masyarakat pada partisipan sadar bahwa sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban terkait masalah politik.

   Kontribusi aktif yang diberikan memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik. Apalagi mengingat masyarakat memang mempunyai peran dalam

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2023) 117–126 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.58

penetapan kebijakan tersebut, tidak hanya oleh penguasa saja. Partisipan secara umum diterapkan pada wilayah yang sistemnya menganut demokrasi. Sebab, pada sistem ini, dalam negara pemerintah serta masyarakat memiliki hak dan juga kebebasan setara.

3. Subjek

   Terakhir adalah subjek, di mana masyarakat tidak sadar dan kurang peduli mengenai sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Warganya lebih tertarik terhadap hasil dari penyelenggaraannya. Sedangkan terkait proses, keterlibatan dan partisipasi termasuk rendah. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh dari warga terhadap sistem ini sangat kecil. Masyarakat hanya menunggu kebijakan dari penguasa saja, tidak ikut andil di dalamnya. Di Indonesia menganut dua jenis budaya yang sering kita temui. Budaya yang berlangsung tergantung dari banyak faktor, namun yang paling dominan adalah lingkungan. Uraian mengenai cirinya sebagai berikut.

   a) Parokial

      Ciri dari parokial yaitu masyarakat apatis, ruang lingkup sempit dan kecil, pengetahuan warga mengenai aspek ini termasuk kategori sangat rendah, masyarakat tidak memperdulikan bahkan menarik diri dari kawasan politik. Ciri lainnya yaitu masyarakat jarang sekali berhadapan dengan sistem ini, kesadaran warga mengenai kewenangan serta kekuasaan negara sangat rendah. Jadi, intinya budaya politik di Indonesia satu ini membuat rakyatnya kurang aktif berpartisipasi.

   b) Partisipan

      Ciri-ciri dari partisipan yaitu masyarakat mempunyai kesadaran tinggi untuk aktif berperan terkait bidang ini dan sadar bahwa warga memiliki hak serta tanggung jawab terhadap kehidupan politik. Ciri lainnya adalah rakyat tidak begitu saja menerima situasi yang ada, tapi secara sadar memberikan penilaian terhadap masalah terkait politik. Budaya politik di Indonesia jenis partisipan ini merupakan yang paling ideal bagi negara demokrasi. Ada beberapa contoh budaya ini di masyarakat Indonesia, yaitu berpartisipasi dalam pemilu bagi yang memenuhi persyaratan ketentuan, ikut serta dalam forum untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai.

      Aktifnya masyarakat dalam kegiatan bidang ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan negara, apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi. Jadi, budaya politik di Indonesia diharapkan tetap mampu membuat rakyatnya aktif berperan. Budaya politik di Indonesia diharapkan tetap mampu membuat masyarakatnya aktif berperan, apalagi mengingat sistemnya demokrasi.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 24 No 3 (2023) 117–126 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.58

KESIMPULAN

Masyarakat yang mayaroritas melayu dan bekerja sebagai nelayan, minin akan pengatahuan politik, mereka cendrung pragmatis dan tidak peduli terhadap politik jika itu tidak menguntungkan bagi mereka. Pra pemilu dan pasca pemilu mereka tidak ambil peduli, hanya pada hari pemilu mereka akan berpratisipasi jika mereka medapatkan sesuatu dari pemilu tersebut. Pilihan politik mereka cenderung beragam, meski mayoritas melayu dan bekerja sebagai nelayan namun untuk pilihan politik cenderung berbeda tergantung dengan keuntungan yang mereka peroleh. Masyarakat yang mayoritas melayu ini cenderung berdasarkan keuntungan apa yang mereka perolah dan seberapa besar yang mereka dapatkan dari pemilu. Dampak positif dari budaya Melayu terhadap pilihan politik ialah, mereka akan cenderung kompak dan teguh terhadap pilihan yang sudah mereka tentukan sendiri. Dampak negatifnya ialah terjadi banyak kubu pemilih karena berbedanya pilihan. Partisipasi yang luar biasa di setiap pemilu namun wawasan y ang pengethuan politik yang minin.

DAFTAR PUSTAKA

Abonu, D. N., Agunlade, F. O., & Yunusa, B. M. (2013). Assesment of Political Awareness Among Students of Social Studies in Nigerian Secondary Schools for Citizenship. *International Journal of education research,* 1, p1-10.

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior. An introduction to theory and research. Addison-Wesley Publishing Company.

Akhrani, L.A. (2016). *Model parrtisipasi politik ditinjau dari kesadaran politik, kepercayaan politik, orientasi nilai sosial, dan sikap politik pemilih di Jawa Timur*. [Disertasi Tidak Diterbitkan. Universitas Airlangga, Surabaya].

Al Qurtuby, Sumanto. (Agustus 2020). Sejarah Politisasi Agama dan Dampaknya Di Indonesia, 13(2).

Budiardjo, Miriam. (1993). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.

Isjwara, F. (1986). Pengantar Ilmu Politik. Bina Cipta.

Matnuh, Hapani., dan Zainal Sarbain. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Partai Politik di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(9), 735–42. (Diakses 6 November 2020, 10.00 wib).

Maulana, A. (2014). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Terus Menurun. http://www.unpad.ac.id. (Diakses 31 Juli 2018).

Milbiath. (2001). Politik Indonesia. Gajah Mada University Press.

Muluk, H. (2012). Pengantar Psikologi Politik. (Edisi Kedua). PT Raja Grafindo Persada.

Myers, D. G. (2012). Psikologi Sosial. (Edisi 10). Buku I. Salemba.

Nursal, A. (2004). Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu. Gramedia Pustaka Utama.

Vol 24 No 3 (2023) 117–126 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN: 3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v24i3.58

R, Widya Sarana Rubyanti. (2009). *Pengaruh Popularitas Terhadap Pilihan Pemilih Pemula (Fenomena Masukny Artis Dalam Politik)*. [Skripsi. Medan:Universitas Sumatera Utara].

Ramlan, S. (1992). Memahami Ilmu Politik. PT Grasindo.

Ramlan, S. (2010). Memahami Ilmu Politik. Gramedia.

S, Humanika Notoatmodjo. (2003). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta.

Saks, M. J., & Krupat, E. (1988). Social psychology and its applications. Harper and Row.

Santrock, J. W. (2003). Adolescence. Perkembangan Remaja. (Edisi Keenam). Erlangga.

Sarjono, H., & Jualita, W. (2011). SPSS vs Listel. Salemba Empat.

Sarwono, S.W. (2012). Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi

Soekanto, S. (1982). Sosiologi Suatu Pengantar. CV Rajawali.

Soetarno. (1994). Pendidikan Bahasa Indonesia 4. Universitas Terbuka

Sosial. Balai Pustaka.

Suprapti, N.W.S. (2013). Pengaruh Sikap Dan Norma Subjektif Terhadap Niat Calon Pemilih Di Kota Denpasar.

Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Gramedia.

Syafar, Muhammad. (Januari 2020). Pemberdayaan Komunitas Majelis Taklim Di Kelurahan Banten Kecamatan Kesemen Kota Serang. *Jurnal: Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten.* (Diakses 15 Oktober 2020, 15.00 wib).

Yusuf, Burhanuddin. (2018). Politik dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah, Kajian Atas Konsep EraKlasik. *Jurnal Aqidah-Ta*, 6(1), 114–30. (Diakses 6 November 2020, 13.00 wib).